

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

- 1 Kelembagaan yang ada di Pemda, POLRI, swasta, dan kelompok masyarakat di Kabupaten Boyolali memiliki persepsi yang baik tentang kawasan TNGMb yaitu terkait potensi sumber daya alam dan pengelolaan kawasan di TNGMb dengan prosentase sebesar 73,91%.
- 2 Peranan *stakeholder* lembaga dalam mendukung pelestarian TNGMb bervariasi yaitu lebih pada fungsi organisasi dalam menjalankan koordinasi. Tingkat keterlibatan kelembagaan dikategorikan masih rendah dengan rata-rata sebesar 65,89% baik dalam aspek konservasi/ lingkungan, sosial budaya, ekonomi maupun organisasi. Hal yang dilakukan saat ini oleh responden hanya sebatas pelibatan program dan kegiatan yang merupakan implementasi kebijakan pengelolaan TNGMb yang bersumber pada anggaran APBN Kementerian LHK melalui Balai TNGMb, dan belum memadukan program antar sektor yang diinisiasi dan dianggarkan oleh masing-masing lembaga.
  - a) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintahan kabupaten berperan dalam mendukung kebijakan pusat melalui Perda RTRW Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011, koordinasi dan keterlibatan dalam penanganan gangguan kawasan berupa kebakaran hutan dan longsor.
  - b) Kepolisian Sektor berperan dalam koordinasi dan keterlibatan dalam perlindungan dan pengamanan kawasan termasuk dalam penanggulangan kebakaran hutan.
  - c) Perusahaan daerah atau Perumda Air Minum Tirta Ampera belum memberikan peran yang signifikan terhadap kawasan karena adanya eksploitasi pemanfaatan air secara komersial yang tidak disertai dengan kewajiban Ijin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA).
  - d) Masyarakat mempunyai andil yang banyak dalam pengelolaan TNGMb secara lestari yaitu mulai dari koordinasi, kerjasama kemitraan, perlindungan dan pengamanan kawasan, rehabilitasi atau penanaman.

- 3 Strategi konservasi terintegrasi antar kelembagaan yang dapat dilakukan dalam mendukung pelestarian kawasan TNGMb yaitu (1) Mensinergikan kebijakan dan program pembangunan di daerah penyangga TNGMb dengan pengelolaan kawasan TNGMb; (2) Mengintegrasikan pengelolaan potensi wisata di dalam dan luar kawasan berbasis masyarakat; (3) Pembentukan forum multisektoral; (4) Mitigasi gangguan atau bencana kawasan TNGMb secara kolaboratif; (5) Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan TNGMb; (6) Inventarisasi potensi dan penyusunan desain tapak wisata alam di zona pemanfaatan melibatkan masyarakat; (7) Pengembangan kawasan penyangga TNGMb; (8) Peningkatan sadar lingkungan kawasan Gunung Merbabu lintas sektor; (9) Pengaktifan kembali forum pemanfaat air dalam TNGMb; (10) Peningkatan kapasitas SDM *stakeholder* mitra.

## 5.2 Saran

Saran untuk pengelolaan kawasan konservasi di TNGMb agar bermanfaat secara ekologi, sosial budaya dan ekonomi dengan mengintegrasikan peran *stakeholder* lembaga terkait yaitu

- 1 Balai TNGMb
  - a. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholder* lembaga terkait khususnya dengan Pemda Kabupaten Boyolali
  - b. Penyusunan desain tapak pengelolaan wisata alam di zona pemanfaatan yang belum dikelola
  - c. Kampanye konservasi TNGMb melalui media sosial atau event lokal dan pendidikan konservasi kepada pengunjung TNGMb melalui media cetak (*booklet* dan *leaflet*) dan pembuatan papan informasi pada gerbang masuk pendakian atau jalur interpretasi wisata alam
  - d. Balai TNGMb menginisiasi pembentukan forum pemanfaat air TNGMb
  - e. Pemberian akses masyarakat yang telah memanfaatkan air dari dalam kawasan secara tidak komersial

## 2 Pemerintah Daerah

- a. Membuat Mou dan kerjasama antara Pemda dan Balai TNGMb dalam pengelolaan kawasan TNGMb dan daerah penyangga khususnya yang berkaitan dengan potensi sumber air dan wisata alam
- b. Penyusunan tata ruang wisata daerah sekitar kawasan TNGMb dan disinergikan dengan potensi wisata kawasan TNGMb yang nantinya akan dikelola oleh masyarakat ditingkat kecamatan atau desa.
- c. Pemerintah Kabupaten Boyolali membangun jaringan terpadu dalam bentuk infrastruktur dan sumber daya yang mendukung pariwisata sehingga mampu menghubungkan satu destinasi wisata dengan destinasi wisata lain dan menyusun paket wisata yang terintegrasi antara obyek wisata di dalam dan luar kawasan melibatkan *stakeholder* terkait diantaranya pengelola TNGMb, pengusaha/ agent travel wisata, disporapar, pemdes, masyarakat
- d. Pemberdayaan masyarakat untuk mengelola potensi sumber air dan wisata baik wisata alam maupun wisata budaya melalui pendampingan kelembagaan wisata terpadu berbasis masyarakat serta peningkatan produktivitas lahan melalui *Integrated Farming System*.
- e. Pemetaan daerah rawan bencana bencana baik di dalam maupun di sekitar kawasan TNGMb, perencanaan anggaran tanggap darurat penanggulangan bencana dan penyuluhan kebijakan pengendalian bencana karhutla atau tanah longsor dengan melibatkan *stakeholder* terkait
- f. Fasilitasi kemitraan antara kelompok masyarakat dengan pihak ketiga, berupa akses permodalan, pemasaran, infrastruktur, kelembagaan dan teknologi.
- g. Kegiatan bina cinta alam dan pendidikan konservasi kepada para pelajar di semua tingkatan sekolah dengan materi sesuai tingkatan pelajar yang dapat diimplementasikan dalam muatan lokal sekolah di Kabupaten Boyolali.

3 PUDAM Tirta Ampera

Segera melaksanakan kewajiban untuk mengurus ijin usaha pemanfaatan air (IUPA) sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/Menhut-II/2013 karena telah melakukan eksploitasi atau pemanfaatan air secara komersial.

4 Masyarakat

Bersama-sama dengan Balai TNGMb dan *stakeholder* terkait mendukung dan berpartisipasi aktif terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan TNGMb secara berkelanjutan.